

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat tema mengenai Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dikecamatan sidikalang. Kemiskinan kini menjadi masalah global yang tak kunjung usai dan sudah melanda semakin banyak penduduk dunia. Perhatian pada kemiskinan merupakan hal yang sangat penting, karena masalah kemiskinan terutama yang terjadi pada negara berkembang sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, aspek lainnya. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan sosial ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang mempunyai potensi lebih tinggi. Kemiskinan akan menghambat tercapainya demokrasi, keadilan, dan persatuan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskina harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius yang dialami oleh sebagian negara didunia. Kemiskinan tidak hanya terjadi di negara-negara kawasan Afrika, melainkan juga dialami dinegara-negara kawasan Asia terutama negara berkembang seperti Indonesia. Bahkan ini menjadi butir pertama dari *sustainable Development Goals (SDGs)* atau disebut “tujuan pembangunan berkelanjutan” yang dideklarasikan oleh negara-negara dalam Konferensi Tingkat

Tinggi (KTT) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada bulan september 2015. Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *sustainable Development Goals* TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pemerintah Indonesia juga melakukan berbagai upaya demi mengentaskan penduduknya dari kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari data statistik, bulan September 2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta jiwa atau bertambah 1,13 juta dibandingkan dengan Maret 2020. Jika dibanding dengan September 2019 jumlah penduduk miskin naik 2,76 juta orang tingkat kemiskinan ini terjadi akibat pandemi covid-19.

Kemiskinan yang mereka alami seakan terus menjadi kemiskinan yang bersifat dari masa kemasa. Sebagian besar masyarakat di Indonesia merasa dihambati dan terbelenggu hidup sulit karena masih kurang terpenuhinya hak – hak dasar mereka seperti kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kondisi tempat tinggal, juga tidak tertinggal dampak yang mereka hadapi akibat dari kenaikan BBM yang bermula pada tahun 2008 hingga pada November 2014. Akibatnya tidak jarang anak – anak beserta keluarga mereka harus ikut terjebak untuk ikut memikul beban bekerja sebagaimana dialami orang tua mereka masing – masing.

Kebijakan pemerintahan menaikkan harga dasar BBM tersebut mengakibatkan harga kebutuhan pokok terus meningkat dan bagi masyarakat kategori miskin tentu mengakibatkan daya beli mereka juga akan semakin menurun, karena mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan harga dipasar. Masyarakat tersebut tentu akan terkena dampak sosial yaitu semakin menurunnya taraf kesejahteraan kehidupannya dan menjadi semakin sulit dan miskin.

Untuk menyikapi hal tersebut, pada bulan April 2016, kementerian Sosial (KEMENSOS) meluncurkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dikirim melalui PT.POS Indonesia ke masyarakat. KKS adalah salah satu program dalam pengentasan kemiskinan saat kebijakan kenaikan BBM. Pemerintah dengan kebijakannya membentuk suatu program pengentasan kemiskinan seperti program KKS yang termasuk dalam program keluarga produktif bersama program Kartu Simpanan keluarga sejahtera, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. KKS yang dimana program ini merupakan pengganti dari Kartu Perlindungan Sosial (KPS). KKS adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda Keluarga Kurang Mampu. Dengan adanya pelaksanaan program ini, pemerintah dapat meningkatkan martabat keluarga kurang mampu dengan perlindungan dan pemberdayaan. Data penerima manfaat Program Simpanan Keluarga Sejahtera menggunakan data-data yang berasal dari Basis Data Terpadu (BDT). BDT merupakan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2011 yang dilakukan oleh biro pusat statistik. Dan diolah lebih lanjut oleh

TNP2K. Dari data tersebut TNP2K membuat urutan keluarga menurut peringkat kesejahteraan dan status sosial ekonominya.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bantuan untuk masyarakat miskin, sesuai dengan intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang “pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif, sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut. KKS ini bertujuan mengurangi masalah kemiskinan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri No.541/3150/SJ tentang pelaksanaan dan pembagian Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KKS) Sebagai pengganti Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dari APBN-2014.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan program yang merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dengan harapan program ini akan dapat mengurangi kemiskinan di negara kita. Dengan demikian dalam kerangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial, pemerintah meluncurkan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program di latarbelakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas SDM. KKS adalah asistensi sosial kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memenuhi kualifikasi tertentu (kronis rentan terhadap guncangan) dengan memberlakukan persyaratan tertentu yang dapat mengubah perilaku individu maupun masyarakat

KKS sebagai perlindungan sosial merupakan upaya dalam mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat yang tidak memiliki kekuatan, sehingga diperlukan penguatan atau pemberdayaan agar warga tersebut memiliki daya untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Tujuan utama dari KKS adalah untuk membantu sumber daya manusia terutama masyarakat miskin. Tujuan tersebut sedana dengan upaya percepatan pencapaian target *Millenium Developmen Goals (MDGs)*. Dimana secara khusus tujuan kks meningkatkan kondisi sosial ekonomi KSM, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KSM, meningkatkan status kesehatan gizi ibu hamil, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan KSM.

Selain itu tujuannya adalah dibidang kesehatan ibu dan anak. Meningkatkan status kesehatan ibu dan anak indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat *preventif* (pencegahan). Kesehatan merupakan kekayaan yang sejati dan kunci untuk melakukan aktivitas, sebab dengan sehat individu dapat melakukan kegiatan perekonomian untuk memenuhi kebutuhannya. Kesehatan juga faktor penentu bagi kesehatan sosial. Orang yang sejahtera bukan saja orang yang memiliki pendapatan atau rumah memadai, melainkan pula orang sehat baik jasmani maupun rohani.

Dalam upaya mengurangi kemiskinan perlu dilakukan pendekatan kemanusiaan yang menekankan pemenuhan dasar, pendekatan kesejahteraan melalui peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif, serta penyediaan jaminan sosial dan perlindungan. Pengentasan kemiskinan perlu

dilakukan secara komprehensif dan terpadu yang melibatkan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat miskin sendiri agar memberikan manfaat yang sebesar-besar bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan miskin.

Pemerintah Indonesia secara tegas dalam pembukaan UUD 1945 masyarakat salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum. Salah satu penghambat terwujudnya kesejahteraan umum adalah kemiskinan. Maka tidak heran negara setiap tahunnya meningkatkan jumlah anggaran untuk program-program dan usaha-usaha pengentasan kemiskinan.

Hingga seperti keadaan sebelumnya, setiap peluncuran program bantuan selalu timbul polemik di masyarakat. Begitu pula dengan peluncuran KKS ini. Banyak masyarakat mengeluhkan masih ada rumah tangga yang kurang mampu tidak mendapat bantuan, masih adanya masyarakat yang tidak memegang kartunya sendiri, serta masih ada kartu yang muncul meskipun nama pemegangnya sudah meninggal. Bahkan rumah tangga yang seharusnya tidak menerima bantuan program tetapi masih muncul sebagai rumah tangga sasaran program.

Dalam pelaksanaannya cukup banyak kalangan masyarakat kurang setuju dengan program KKS ini. Ada yang berpendapat bahwa program KKS kepada Rumah Tangga Sasaran bersifat charity dan menimbulkan budaya malas, ketergantungan, dan meminta-minta belaskasih pemerintah serta menumbuhkan budaya konsumtif sesaat serta peristiwa pemberian KKS yang salah sasaran. fakir

miskin yang diperintahkan oleh hukum tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, cermat, dan sepenuhnya oleh pemerintah. Pengelolaan penanganan fakir miskin karena kurangnya sosialisasi dari instansi terkait mengenai KKS serta penggunaan KKS dan penyalurannya belum tepat sasaran.

Namun ada juga masyarakat yang membutuhkan dan setuju dengan adanya program KKS ini walaupun jumlah dana yang mereka terima tidak begitu besar namun beberapa pengamat ataupun kalangan menilai positif dengan adanya program bantuan ini karena tentu akan menambah pendapatan atau pemasukan keluarga, yang selanjutnya dapat menambah pemenuhan kebutuhan pokok yang mereka perlukan sehari – hari. Dan namun tidak jarang juga ada masyarakat yang kurang setuju dengan dijalankannya kartu keluarga sejahtera ini.

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik membahas mengenai implementasi dari program KKS. Oleh karena itu penulis ingin mengambil judul “Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kinerja Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi?
2. Apa faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kecamatan Sidikalang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu:

1. Untuk mengetahui Kinerja Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi program Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Sidikalang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah sehingga dapat disimpulkan manfaat penelitian yaitu:

1.4.1 Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan pada peneliti dan dapat menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama peneliti kuliah di jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen.

1.4.2. Secara Praktis

Secara praktis bagi penulis, berguna sebagai suatu sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis dan metodologis serta memiliki kemampuan dalam menganalisis setiap gejala dan permasalahan dilapangan. Tentu ini memberikan data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama bagi mereka yang secara serius mengamati jalannya Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta dapat dijadikan

sebagai kontribusi terhadap pemecahan permasalahan yang terkait dengan program tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Sebagai titik tolak atau landasan berfikir dalam menyoroti atau memecahkan permasalahan perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah itu disoroti. Teori menurut BABBIE (dalam Sudjana, 1992 : 8) ialah “ penjelasan sistematis tentang suatu fakta dan atau hukum yang berhubungan dengan aspek kehidupan”. Teori menurut Singaribun (1999 : 37) ialah “ Teori merupakan serangkain asumsi, konsep, konstruksi definisi dan proposisi untuk menerapkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep”. Selanjutnya untuk mengenal teori, menurut Moh.Nazir (1985) ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Teori adalah seperangkat proposisi yang terdiri dari konstruk yang sudah didefinisikan secara luas dengan hubungan unsur-unsur dalam seperangkat proposisi tersebut secara jelas;
2. Teori menjelaskan hubungan antara variabel atau antara konstruk sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena-fenomena yang diterangkan oleh variabel dengan jelas kelihatan;
3. Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan variabel mana berhubungan dengan variabel lainnya.

2.1.1 Kebijakan Publik

2.1.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan harus dapat berinteraksi dengan orang lain. Didalam setiap interaksi itu kadang kala membawa masalah. Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan yang mencakup segala sendi kehidupan bermasyarakat harus dapat mengatasi masalah – masalah yang timbul tersebut yakni dengan lahirnya kebijakan-kebijakan tapi kadang kalah, kebijakan itu tidak dapat menjawab kebetulan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Ealau dan Prewitt (dalam Suharto 2020: 10) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu).

Titmuss (dalam Suharto 2020: 10) mendefenisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan publik dilihat dari kamus administrasi publik Chandler dan Plano (dalam pasolong 2016:46) ialah “ mengatakan bahwa kebijakan publik adalah

pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah”. Sedangkan, Nasucha (dalam pasolongan 2016:47) ialah “ mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum”.

Menurut Dye (dalam Suharto 2020 : 60) memberikan defenisi kebijakan publik secara luas, yakni sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*” sementara itu, Anderson yang juga dikutip oleh Suharto , menyampaikan defenisi kebijakan publik yang relatif lebih spesifik, yaitu sebagai “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”. Untuk memahami berbagai definisi kebijakan, ada baiknya jika membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik.

1. Tindakan pemerintahan yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan oarang banyak.

4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintahan.

2.1.2 Implementasi Kebijakan

2.1.2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh negara melalui badan-badan pemerintahan. Sebab implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*public services*). Namun, pada kenyataannya implementasi publik yang beraneka ragam, baik dalam hal bidang, sasaran, dan bahkan kepentingan, memaksa pemerintah menggunakan kewenangan diskresi, untuk menentukan apa yang harus dilakukan mereka dan apa yang tidak

Implementasi yang telah melalui tahap rekomendasi merupakan prosedur yang relatif kompleks. Sehingga tidak selalu ada jaminan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil dalam penerapannya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat terkait dengan beberapa aspek, diantaranya; pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen, dan konsistensi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintahan. Van Meter (dalam Novita Tresiana dan Noverman Duadji, 2019:2) ialah “ bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintahan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan”.

Keberhasilan implementasi menurut Grindle (dalam Subarsono, 2021: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan

Teori Menurut Mazmanian (dalam Subarsono, 2021: 94) ialah “ ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*)”.

2.1.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Edward III (dalam Subarsono 2011:90–92), implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh pelaksanaan kebijakan (*implementor*).

Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yang saling berhubungan satu sama lain, yakni:

1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang

berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

2. Sumber Daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat

dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan. Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun

pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

3. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu

penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
- Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan prosesproses dalam badan pelaksana;
- Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);
- Vitalitas suatu organisasi;
- Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
- Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan. Bila sumberdaya cukup untuk

melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

2.1.2.3 Karakteristik Implementasi

Karakteristik masalah meliputi beberapa faktor sebagai berikut :

1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Disatu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah untuk dipecahkan, seperti kekurangan persediaan makanan dan air bersih didaerah bencana. Dipihak lain ada masalah-masalah sosial yang memiliki kompleksitas yang cukup tinggi, sehingga relatif sulit untuk dipecahkan, seperti kemiskinan, korupsi, pengangguran, dan sebagainya. Oleh karena itu, karakteristik masalah itu sendiri mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.
2. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Artinya, suatu program akan relatif mudah untuk diimplementasikan suatu kelompok sasaran yang relatif homogen. Sebaliknya, untuk kelompok sasaran yang relatif heterogen, implementasi kebijakan juga akan relatif sulit. Dengan kata lain semakin heterogen sebuah kelompok sasaran, maka tingkat kesulitan implementasi kebijakan juga relatif meningkat.

3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang ditujukan untuk memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan lebih mudah diimplementasikan dari pada sebuah program yang ditujukan untuk merubah perilaku masyarakat.

Karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*)

mencakup beberapa hal, yaitu :

1. Kejelasan isi kebijakan semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan semakin mudah untuk diimplementasikan karena implementor muda memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi dalam kebijakan.
2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan tertentu perlu ada modifikasi.
3. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut. Karena bagaimanapun dalam tahapan implementasi kebijakan akan membutuhkan biaya operasional.

4. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Setiap institusi yang terkait dengan implementasi kebijakan harus melakukan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal.
5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Distorsi terhadap implementasi kebijakan dapat terjadi jika komitmen implementor terhadap rendah. Ada banyak contoh yang dapat kita pakai, misalnya bagaimana sebuah implementasi kebijakan menjadi kacau karena perilaku korup implementor.
7. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi. Sebuah kebijakan yang memungkinkan banyak masyarakat untuk ikut berpartisipasi akan lebih mendapat dukungan dari pada kebijakan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat didalamnya.

Sedangkan variabel lingkungan meliputi beberapa faktor, yaitu :

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemjuan teknologi. Masyarakat yang terbuka dan terdidik akan lebih mudah untuk menerima program-program pembaharuan (hal-hal baru) dibanding masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Begitu juga halnya dengan kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi kebijakan, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi.

2. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang mendapat dukungan dari publik akan lebih mudah diimplementasikan daripada kebijakan yang ditolak oleh publik.
3. Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups). Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain : *Pertama*, kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana intervensi berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan. *Kedua*, kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan-badan legislatif. *Ketiga*, tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen implementor untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan merupakan variabel yang parsial. Di samping itu keberhasilan implementasi kebijakan juga

Menuntut keterampilan dari para implementor kebijakan. Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Ada lima variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

1. Standar dan sasaran kebijakan.

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, karena ketidakjelasan standar dan sasaran kebijakan berpotensi untuk menimbulkan

multiinterpretasi yang akhirnya akan berimplikasi pada sulitnya implementasi kebijakan.

2. Sumber daya.

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*) kurangnya sumberdaya akan menyulitkan implementasi kebijakan.

3. Hubungan antar organisasi.

Jalinan hubungan kerjasama yang sinergis diperlukan antar instansi terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

4. Karakteristik agen pelaksanaan

Mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi kebijakan.

5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan; apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting:

- a. Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
- b. Kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan
- c. Intensitas disposisi implementor, yang preferensi nilai yang dimiliki implementor.

2.1.3 Defenisi Kemiskinan

2.1.3.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, tempat tinggal, dan pendidikan dan kesehatan yang layak. Defenisi tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan yang memenuhi kebutuhan dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral.

Kemiskinan juga sering dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut BPS (2020) kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pengertian Kemiskinan Menurut Tjokrowinoto dalam Sulistiyani yang menyatakan bahwa: kemiskinan tidak hanya menyangkut masalah kesejahteraan (*welfare*) semata, tetapi kemiskinan menyangkut persoalan kerentanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan (*powerlest*), tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi, angka ketergantungan tinggi, rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan

terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Lebih lanjut, Sulistiyani menyatakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi yang jauh dari keadaan yang disebut sejahtera. Sejahtera merupakan kondisi dimana seseorang berada pada suatu kondisi telah mampu memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan dasar. Pendapat kedua, Suharto menyatakan bahwa: kemiskinan merupakan konsep dan fenomena kemiskinan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Ketidak mampuan memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti pangan, sandang, dan papan.
2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih, dan transportasi.
3. Ketiadaan jaminan masa depan
4. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual atau massa
5. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia, keterbatasan sumber daya alam
6. Ketidakterlibatan terhadap dalam kegiatan sosial masyarakat
7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan
8. Ketidak mampuan untuk berusaha karena cacat fisik atau mental
9. Ketidakmampuan adan ketidak beruntungan sosial seperti anak terlantar, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil.

Menurut Jhon Friedman (dalam Suyanto 2019:2) kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Sementara yang

dimaksud basis kekuasaan sosial itu menurut Friedman meliputi: pertama, modal produktif atas aset, misalnya tanah perumahan, peralatan, dan kesehatan. Kedua sumber keuangan, seperti income dan kredit yang memadai. Ketiga organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi. Keempat network jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan yang memadai. kelima informasi – informasi yang berguna untuk kehidupan.

Ada juga pengertian kemiskinan yang dikembangkan oleh Sajogyo. Dikatakan bahwa, bahwa kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada dibawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasarkan atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi.

Levitan (didalam Suyanto 2019:1) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dalam pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Schiller kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas.

Menurut Suharto (Dalam Agus 2014 :9) menyatakan bahwa kemiskinan pada hakikatnya merupakan “Persoalan yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupak persoalan aktual dari masa ke masa” meskipun sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan kemiskinan harus terus menerus diupayakan. Kemiskinan adalah masalah sosial yang

senantiasa selalu hadir di tengah masyarakat khususnya di negara berkembang masalah kemiskinan begitu menarik untuk dibahas di berbagai kalangan baik para akademis maupun praktis

Menurut Wilkinson (dalam Suyanto 2018;5) kemiskinan adalah “Hal yang telah jelas meningkatkan kita semua ketidaksamaan dan kesjangan bukan hal menyebabkan ketimpangan kesempatan maju tetapi juga menyebabkan biaya sosial yang di tanggung jauh lebih mahal” sebuah bangsa yang di recoki masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial, kesempatan untuk maju bersaing sejak dengan bangsa yang lain niscaya akan menghadapi berbagai tantangan internal yang kontral produktif.

Kemiskinan juga berartri kekurangan kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak.

Ada tiga cara yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia

1. Banyak rumah tangga yang berada disekitar garis kemiskinan nasional,yang standar dengan US\$ 1,55 perhari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak rentan terhadap kemiskinan.
2. Ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong “miskin dari segi pendapatan”. Dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses

terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia.

3. Mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antara daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia (Bank Dunia).

2.1.3.2 Standar Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka garis kemiskinan Indonesia pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp454.652,-/ kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp335.793,- (73,86 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp118.859,- (26,14 persen). Pada Maret 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.118.678,-/rumah tangga miskin/bulan.

Adapun beberapa standar pengukuran kemiskinan yang digunakan oleh BPS yaitu sebagai berikut:

a. Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang

memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

b. Konsep Garis Kemiskinan(GK)

1. Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKS) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan penduduk miskin.
2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sauran kacang-kacangan, buah-buahan dan lemak,ddl)
3. Garis kemiskinan Non makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili olehh 51 jenis komoditi diperkotaan dan 47 jenis komoditi dipedesaan.

2.1.3.3 Bentuk-Bentuk Kemiskinan

Secara umum, ada beberapa bentuk kemiskinan yang ada dimasyarakat.

Bentuk-Bentuk Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut yaitu bila pendapatnya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif yaitu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural yaitu mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

d. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural yaitu situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

2.1.4 Konsep Kesejahteraan Publik

Konsep kesejahteraan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai (id.wikipedia.org). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan merupakan representasi yang bersifat kompleks karena mempunyai keterkaitan multidimensi. Secara umum kesejahteraan dapat diukur dari sisi demografi, kecukupan pangan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kondisi lingkungan. Kemiskinan merupakan bentuk ketidakmampuan untuk meraih kesejahteraan di pandang dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu- individu.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	NAMA PENELITIAN DAN JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN DAN TEORI/PENDEKATAN KONSEP	HASIL PENELITIAN
1.	Andela Anggleni Implementasi kebijakan program kartu keluarga sejahtera (KKS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin	Deskriptif kualitatif Konsep implementasi kebijakan Van metter dan Van Horn	Implementasi kebijakan program kartu keluarga sejahtera (kks) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin program kartu keluarga sejahtera adalah program yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengeluarkan instruksi presiden republik indonesia nomor 7 2014 tentang pelaksanaan program kartu keluarga sejahtera, program indonesia pintar, program indonesia sehat untuk membangun keluarga produktif dan pada penelitian ini program kartu

			keluarga sejahtera belum berjalan efektif karena beberapa warga miskin belum ikut serta kurangnya sosialisasi dan koordinasi dari pemerintahan pusat sehingga data penetapan kepersertaan program KKS tersebut tidak akurat dan tepat sasaran.
2	Dara yolanda Implementasi program kartu keluarga sejahtera dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif pendekatan kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi KKS untuk mensejahterakan masyarakat desa belum optimal dilakukan, karena sumber dana yang belum bisa dicairkan. Jadi belum tau apakah program ini dapat mensejahterakan masyarakat atau tidak. Namun dilihat dari pendistribusian kartu sudah optimal.
3	Ulfa ulfa Implementasi kebijakan program kartu keluarga sejahtera	Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif teknik analisis data dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, display data,	Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari penelitian ini

		dan penarikan kesimpulan	yaitu menunjukkan belum optimalnya implementasi kebijakan yang dilaksanakan, disebabkan beberapa faktor yaitu kurangnya sosialisasi dan informasi dari Aparat Desa dan Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kepada masyarakat mengenai program yang dikeluarkan pemerintah, pendataan dilakukan secara tertutup, dan lambannya aparat desa dalam melakukan validasi sehingga penentuan masyarakat yang menerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) diambil berdasarkan BDT (Basis Data Terpadu) tahun 2011, yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
4	Maslina Sitanggang Implementasi	Metodologi yang dilakukan dalam penelitian deskriptif kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

	Program Kartu Keluarga Sejahtera	Teknik analisis data dari buku Cresswell yaitu mengelola, membaca, mengkode, memproses coding, deskripsi, menganalisis data	Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
--	----------------------------------	---	---

2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam penelitian ini, penelitian merangkai sebuah kerangka berfikir terhadap objek yang akan diteliti antara lain:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teori mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Strategi-strategi penelitian merupakan jenis-jenis rancangan penelitian kualitatif, kuantitatif dan campuran yang menetapkan prosedur-prosedur khusus dalam penelitian.

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk membuat penjelasan, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta fenomena yang diselidiki. Analisis dilakukan terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data dan informasi yang diperoleh dilokasi penelitian.

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian

Dalam hal ini perlu dikemukakan tempat dimana situasi sosial tersebut akan diteliti Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.

Pemilihan penelitian ini didasarkan pada pertimbangan lebih mudah untuk jangkauan informasi dan pengumpulan data serta dianggap perlu untuk melakukan penelitian mengenai implementasi program kartu keluarga sejahtera upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penelitian ini dilakukan pada tanggal 8 Juli 2021 sampai 8 Agustus 2021

3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian berangkat dari kasus tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditranferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Oleh karena itu, situasi sosial yang diamati secara mendalam oleh peneliti adalah pengamatan terhadap kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di kecamatan sidikalang. Dalam penelitian untuk menentukan sampel/ informan yang digunakan dalam penelitian. Yang menjadi informan dalam penelitian tersebut adalah:

1. informan kunci, yaitu yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti yang diperlukan peneliti yang menjadi informasi kunci dalam penelitian ini yaitu masyarakat kecamatan sidikalang.
2. informan utama, yaitu yang merujuk pada seseorang dalam memberikan penjelasan dalam terkait topik yang dibahas sipeneliti. informan utama dalam penelitian ini adalah aparatur desa dan masyarakat kecamatan sidikalang.

3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat dibutuhkan dalam memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial dalam penelitian. Adapun informasi tambahan dari penelitian ini adalah kepala kecamatan sidikalang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian yaitu data primer, merupakan data tentang implementasi program kartu keluarga sejahtera yang bersumber langsung dari informan atau sumber data berupa observasi, wawancara dan kusioner. Selain data primer adapun juga dikumpulkan data sekunder yaitu bersumber dari dokumen pribadi, dan dokumen resmi dari kelembagaan, dan lain-lain yang memiliki relevansi terhadap fokus penelitian dalam hal ini yang menjadi data sekunder yaitu arsip dan laporan dalam program keluarga sejahtera.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktifitas individu – individu dilokasi penelitian

2. Wawancara, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam dari informan. Pengumpulan data dilakukan melalui pertanyaan secara lisan dengan partisipan.
3. Selama proses penelitian, peneliti ini juga mengumpulkan Dokumen-dokumen kualitatif. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik seperti koran, makalah, atau lapoaran–laporan kantor atau email.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisi data menurut Creswell (2013;274) merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka, yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informasi dari parapartisipasi. Analisis data kualitatif yang dilaporkan dalam artikel-artikel jurnal dalam buku-buku ilmiah sering kali menjadi model analisis yang umum digunakan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

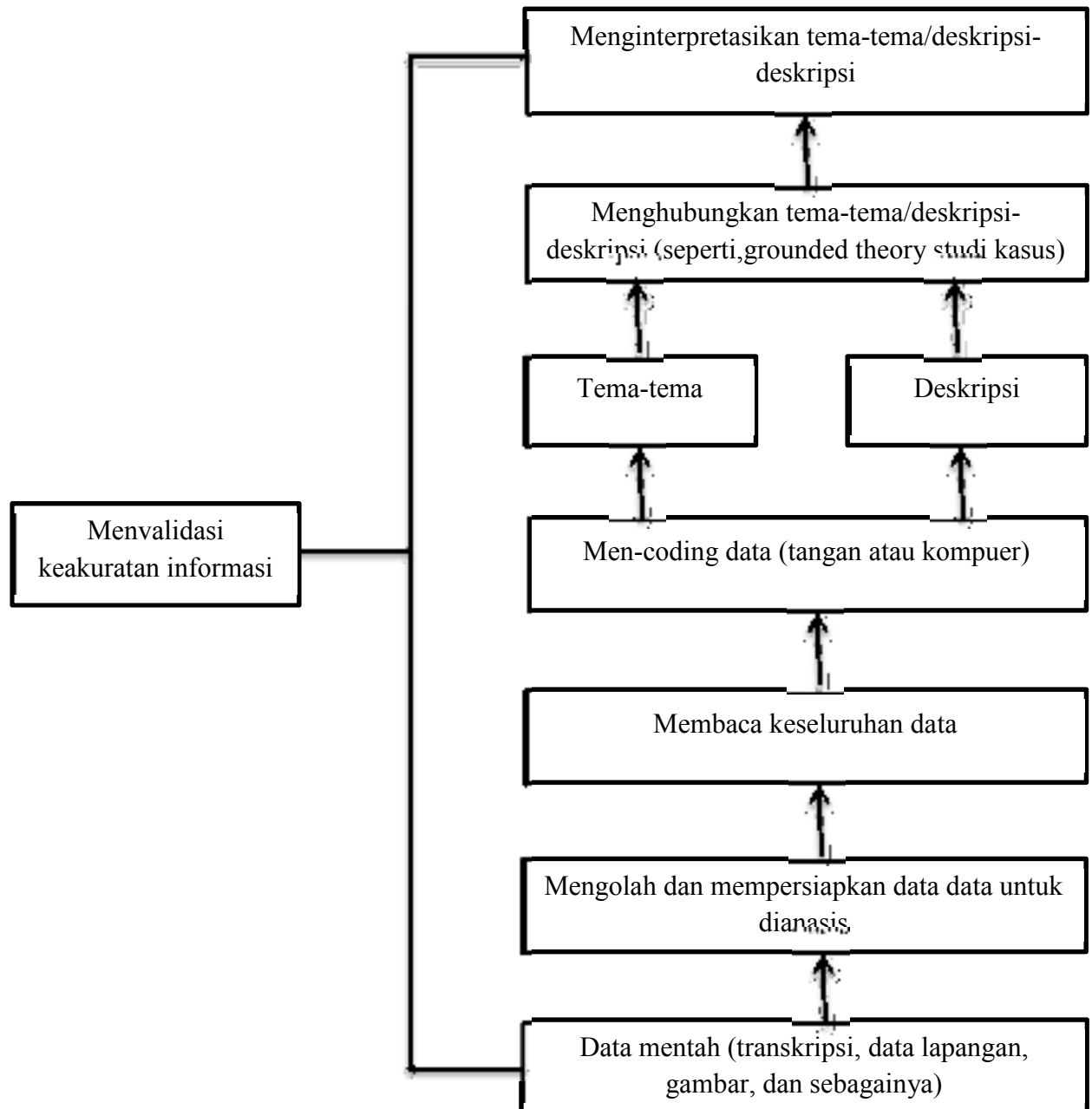
1. Mengelola dan Mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara dan men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah data menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun generealsense atas informasi yang diperoleh dalam merefleksikan maknanya secara keseluruhan.

3. Menganalisis lebih detail dengan mengkode data. Coding merupakan proses pengelolaan materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahapan mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengambilan mensegmentasi kalimat-kalimat atau (paragraf-paragraf) gambar-gambar tersebut kedalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada istilah/bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.
4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting orang-orang kategori-kategori dan tema-tema dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha menyampaikan informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-teama ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Pendekatan yang paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis.
6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memakai data. Mengajukan pertanyaan seperti “pelajari apa yang bisa diambil dari semua ini?” akan membantu peneliti mengungkapkan suatu gagasan.

3.5 Teknik Analisis data

Gambar 3.1

Teknik Analisa Data



Sumber, Jhon W. Cresweel (2013;274) gambar teknik analisis data

